



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
**KECAMATAN SIANTAN**

Jalan Soekarno Hatta, Tarempa Selatan, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau 29791,  
Pos-el kecamatansiantan@anambas.go.id

Tarempa, 04 September 2025

Yth.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Kepulauan Anambas

Di -

Tempat

**SURAT PENGANTAR**  
Nomor : 138/KCS/09.2025

No	Jenis Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Rancangan Akhir Renstra Tahun 2025-2029 Kecamatan Siantan	1 (satu) Berkas	Demikian disampaikan atas perhatian di ucapkan terimakasih.

Diterima Tanggal :

Penerima,

.....

**CAMAT SIANTAN,**



**KAHARUZZAMAN, S.Sos**

Pembina TK.I / IV.b

NIP. 19701116 199101 1 001



# **RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SIANTAN**

*Tahun*

**2025 - 2029**



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Siantan periode 2025–2029 dapat disusun dengan baik. Dokumen ini merupakan pedoman strategis bagi seluruh pemangku kepentingan di Kecamatan Siantan dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik yang berkualitas, serta pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Renstra ini disusun dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, sekaligus memperhatikan potensi lokal dan aspirasi masyarakat yang menjadi fondasi utama dalam perencanaan pembangunan.

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik melalui masukan, ide, maupun data yang relevan. Harapan kami, Renstra ini dapat menjadi panduan yang efektif dalam mengoptimalkan potensi Kecamatan Siantan sekaligus menghadapi tantangan yang ada selama lima tahun mendatang. Semoga Renstra ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan menjadi langkah awal dalam mewujudkan visi dan misi Kecamatan Siantan.

Tarempa, 4 September 2025

CAMAT SIANTAN,

  
KAHARUZZAMAN, S.Sos

Pembina Tk. I/ IV.b

NIP. 19701116 199101 1 001



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II .....</b>	<b>8</b>
<b>GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>8</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	8
2.2 Sumber Daya Aparatur .....	10
2.3 Kinerja Pelayanan.....	14
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .....	19
2.5 Permasalahan dan Isu-isu Strategis.....	22
2.6 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi .....	22
2.7 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ...	26
2.8 Telaahan Renstra K/L dan Renstra .....	27
2.9 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Telaahan Renstra K/L dan Renstra .....	29
2.10 Penentuan Isu-isu Strategis.....	31
<b>BAB III.....</b>	<b>34</b>
<b>TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>34</b>
3.1 Tujuan dan Sasaran .....	34
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan .....	36
<b>BAB IV .....</b>	<b>38</b>
<b>RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN SERTA KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>38</b>
4.1 Latar Belakang.....	38
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .....	44
<b>BAB V.....</b>	<b>46</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>46</b>



## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 2. 1	
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kualifikasi Golongan dan Jabatan .....	11
Tabel 2. 2	
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan .....	12
Tabel 2. 3	
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kelamin .....	12
Tabel 2. 4	
Sarana dan Prasarana Pendukung .....	124
Tabel 2. 5	
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas .....	126
Tabel 2. 6	
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan .....	128
Tabel 2. 7	
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	25
Tabel 3. 1	
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....	35
Tabel 3. 2	
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .....	36
Tabel 4. 1	
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Siantan .....	40
Tabel 4. 2	
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran .....	44
Gambar 2. 1	
Struktur Organisasi Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas .....	140



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kecamatan Siantan merupakan salah satu wilayah administratif di Kabupaten Kepulauan Anambas yang memiliki karakteristik geografis, sosial, dan budaya yang unik. Sebagai kecamatan yang didominasi oleh wilayah kepulauan, Kecamatan Siantan menghadapi tantangan dalam aksesibilitas, distribusi layanan, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Kondisi ini menuntut adanya perencanaan strategis yang terarah dan berkelanjutan untuk memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah kecamatan.

Seiring dengan dinamika pembangunan daerah, Kecamatan Siantan juga menghadapi perubahan lingkungan strategis, baik di tingkat lokal maupun nasional. Perkembangan teknologi, tuntutan pelayanan publik yang lebih baik, dan kebutuhan akan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, perencanaan strategis ini dirancang untuk menjawab tantangan sekaligus memanfaatkan peluang yang ada demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini disusun sebagai tindak lanjut dari mandat perencanaan pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Renstra Kecamatan Siantan periode 2025–2029 menjadi dokumen penting yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program prioritas kecamatan untuk lima tahun ke depan. Dokumen ini juga berfungsi sebagai panduan bagi seluruh perangkat kecamatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien.



Dalam penyusunannya, Renstra ini mengedepankan prinsip partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi. Proses penyusunan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah kecamatan, pemangku kepentingan, hingga masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dirumuskan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat, sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Potensi lokal Kecamatan Siantan, seperti sektor perikanan, pariwisata bahari, dan kearifan lokal, menjadi keunggulan yang harus dioptimalkan. Namun, potensi ini tidak lepas dari berbagai tantangan, termasuk keterbatasan infrastruktur, minimnya akses terhadap pasar, dan risiko perubahan iklim. Renstra ini diharapkan mampu menjadi dokumen strategis yang tidak hanya mengidentifikasi permasalahan, tetapi juga memberikan solusi yang konkret dan berkelanjutan untuk pembangunan kecamatan.

Dengan adanya Renstra ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan di Kecamatan Siantan dapat bekerja sama secara sinergis dalam mewujudkan visi pembangunan yang telah ditetapkan. Renstra ini juga diharapkan dapat menjadi landasan yang kokoh bagi upaya bersama dalam menghadirkan perubahan positif yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas secara keseluruhan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Siantan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kepulauan Anambas (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gender Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1- 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah



- Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 105 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 105);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 96, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 97);
  18. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas;
  19. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Siantan periode 2025–2029 memiliki maksud utama sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi acuan bagi pemerintah kecamatan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan. Dokumen ini dirancang untuk memberikan arah strategis dalam upaya meningkatkan



kualitas pelayanan publik, memberdayakan masyarakat, serta mengoptimalkan pengelolaan potensi wilayah secara efektif dan efisien.

#### **b. Tujuan**

Tujuan utama penyusunan Renstra ini adalah untuk menyelaraskan visi dan misi Kecamatan Siantan dengan kebijakan pembangunan di tingkat Kabupaten Kepulauan Anambas. Hal ini bertujuan agar setiap program kerja kecamatan dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif. Selain itu, Renstra ini juga bertujuan untuk memastikan perencanaan yang terintegrasi, berbasis data, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.

Secara khusus, penyusunan Renstra ini bertujuan untuk:

1. Menyediakan dokumen panduan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program prioritas Kecamatan Siantan selama lima tahun ke depan.
2. Mengidentifikasi permasalahan dan potensi wilayah yang dapat dijadikan dasar dalam merumuskan langkah-langkah strategis pembangunan.
3. Meningkatkan sinergi antara pemerintah kecamatan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan.
4. Membangun sistem perencanaan yang akuntabel dan transparan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.
5. Mendorong implementasi program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan keberlanjutan lingkungan.



## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan uraian singkat tentang sistematika penyusunan Renstra.

### BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam bab ini memuat struktur organisasi Kecamatan Siantan, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Kecamatan Siantan periode sebelumnya dan menjelaskan hambatan-hambatan yang masih dihadapi dan perlu solusi pemecahan permasalahan serta permasalahan dan isu strategis berisi tentang identifikasi permasalahan strategis berdasarkan tugas dan fungsi dari Kecamatan Siantan, telaah dan rumusan isu – isu strategis.

### BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam bab ini menjelaskan tujuan, sasaran organisasi, strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan.

### BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menjelaskan uraian Program, Kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah.

### BAB VIII PENUTUP



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas serta Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Siantan memiliki peran strategis dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan di tingkat kecamatan.

Kecamatan memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi pemerintahan umum di wilayahnya. Tugas ini mencakup koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, pelayanan publik, serta pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan kebijakan dan program prioritas daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan Siantan menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Membina dan mengawasi pelaksanaan tugas pemerintahan desa serta menyelaraskan program kerja dengan kebijakan daerah.

2. Pelayanan Publik

Menyelenggarakan layanan administratif kepada masyarakat, pengurusan surat rekomendasi, dan pelayanan lainnya.



3. Pelaksanaan Pembangunan

Memfasilitasi pelaksanaan pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat serta memastikan keberlanjutannya sesuai dengan perencanaan daerah.

4. Pengelolaan Keuangan dan Aset

Mengelola anggaran kecamatan serta aset yang dimiliki dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi seperti diuraikan diatas, bentuk Susunan Organisasi Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri dari :

1. Camat

Pimpinan kecamatan yang bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan.

2. Sekretariat Kecamatan

Membantu camat dalam koordinasi administrasi, yang terdiri dari:

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Keuangan
- Sub Bagian Program

3. Seksi-seksi Teknis

Melaksanakan tugas-tugas teknis kecamatan, yang meliputi:

- Seksi Tata Pemerintahan
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

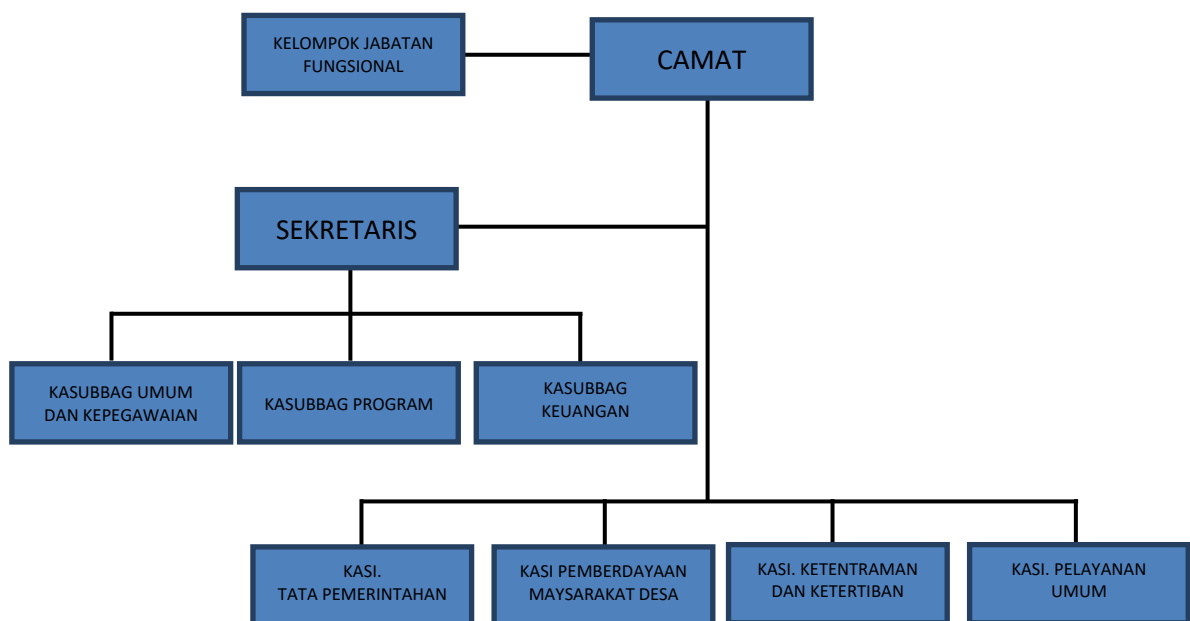


- Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- Seksi Pelayanan Umum

#### 4. Kelompok Jabatan Fungsional

Mendukung pelaksanaan tugas tertentu berdasarkan keahlian dan kompetensi masing-masing. Lebih lanjut Struktur Organisasi Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini.

**Gambar 2. 1**  
**Struktur Organisasi Kecamatan Siantan**  
**Kabupaten Kepulauan Anambas**



## 2.2 Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur Kecamatan Siantan Per Agustus 2025 berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) orang terdiri dari 17 Pegawai Negeri Sipil dan 20 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Selanjutnya sumber daya aparatur berdasarkan kualifikasi pegawai sebagai berikut :



**a. Sumber Daya Aparatur berdasar kualifikasi golongan dan jabatan**

Adapun komposisi Pegawai Kecamatan Siantan Tahun 2025 berdasarkan Kualifikasi golongan dan jabatan sebagai berikut :

**Tabel 2. 1**  
**Sumber Daya Aparatur**  
**Berdasarkan Kualifikasi Golongan dan Jabatan**

<b>Golongan</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Jumlah</b>
Pembina Tk. I	Eselon III.a	1 Orang
Penata Tk. I	Eselon III.b	1 Orang
Penata Tk. I	Eselon IV.a	3 Orang
Penata	Eselon IV.a	2 Orang
Penata Muda Tingkat I	Eselon IV.b	6 Orang
Penata Muda Tingkat I	Pelaksana	1 Orang
Penata Muda	Pelaksana	2 Orang
Pengatur	Pelaksana	1 Orang
PPPK	Staf	20 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>37 Orang</b>

**b. Sumber Daya Aparatur berdasarkan kualifikasi pendidikan**

Adapun komposisi pegawai Kecamatan Siantan tahun 2025 dengan latar belakang pendidikan sebagai berikut :



**Tabel 2. 2**  
**Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**

No	Sumber daya aparatur	Kualifikasi Pendidikan
1	PNS : 19 Orang	S1 : 15 Orang
		D4 : 0 Orang
		SMA/SMK : 2 Orang
2	PPPK : 20 Orang	S1 : 9 Orang
		D2 : - Orang
		SMA/SMK : 11 Orang
		SMP : - Orang
<b>Jumlah</b>		<b>37 Orang</b>

**c. Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kelamin**

Sumber Daya Aparatur berdasarkan kelamin yang ada pada kantor Kecamatan Siantan didominasi kaum laki-laki yang terdiri dari PNS dan PPPK, berikut ini sumber daya aparatur PNS dan PPPK berdasar kelamin.

**Tabel 2. 3**  
**Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kelamin**

Sumber daya aparatur	Laki-Laki	Perempuan
PNS	8	9
PPPK	6	14
<b>Jumlah</b>	<b>14</b>	<b>23</b>

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan elemen penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, termasuk di Kecamatan Siantan. Namun, saat ini terdapat tantangan yang signifikan terkait distribusi ASN yang belum merata di seluruh unit kerja. Oleh karena itu, diperlukan upaya penataan ulang agar ASN dapat terdistribusi dengan baik sesuai kebutuhan tugas, pokok, dan fungsi yang bersifat koordinatif. Penataan ini juga harus memperhatikan kualitas sumber daya manusia, sehingga diharapkan ASN



yang bertugas didominasi oleh lulusan minimal tingkat Sarjana dari berbagai disiplin ilmu. Dengan demikian, pelaksanaan tugas dapat berjalan secara seimbang dan efisien, mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal.

Selain itu, dalam menghadapi kebutuhan sumber daya aparatur yang terus meningkat, perekrutan ASN menjadi hal yang sangat krusial, terutama dalam lima tahun mendatang. Jumlah ASN yang terbatas saat ini menuntut adanya kebijakan strategis, termasuk pelaksanaan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang direncanakan pada tahun 2025. Perekrutan P3K ini diharapkan mampu mengisi kebutuhan tenaga kerja yang mendesak, terutama pada unit kerja yang membutuhkan tenaga ahli. Selain itu, aspek kesetaraan gender juga tetap menjadi perhatian, mengingat proporsi aparatur perempuan saat ini sudah cukup memadai. Dengan memastikan keterwakilan gender yang proporsional, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang inklusif dan berkeadilan.

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Siantan juga sangat bergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana ini mencakup segala fasilitas yang digunakan dalam menunjang pelayanan publik dan administrasi perkantoran. Penyediaan fasilitas yang sesuai standar menjadi prioritas untuk mendukung efisiensi kerja ASN. Dengan kombinasi distribusi ASN yang merata, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perekrutan, serta optimalisasi sarana dan prasarana, Kecamatan Siantan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.



**Tabel 2. 4**  
**Sarana dan Prasarana Pendukung**

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Laptop	1 Unit	2016
2	Printer	2 Unit	2016
3	PC	6 Unit	2017
4	Laptop	9 Unit	2017
5	Printer	6 Unit	2017
6	Meja Rapat	1 Unit	2017
7	Meja Kerja Eselon II	1 Buah	2017
8	Meja Kerja Eselon III	5 Buah	2017
9	Meja Kerja Non Struktural	24 Buah	2017
10	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	14 Buah	2017
11	Meja Rapat Pejabat Lain-lain	1 Buah	2017
12	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 Buah	2017
13	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5 Buah	2017
14	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	10 Buah	2017
15	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	40 Buah	2017
16	Kursi Tamu	1 Set	2017
17	Lemari Arsip	2 Buah	2017
18	Proyektor	1 Buah	2017
19	Meja Kerja I.2 Biro	4 Unit	2018
20	Kursi Kerja Putar	12 Unit	2018
21	Lemari Arsip	4 Unit	2018
22	Lemari Buku	1 Unit	2018
23	Laptop	2 Unit	2018
24	Personal Computer (PC)	2 Unit	2018
25	Lemari Arsip	2 Unit	2019
26	Lemari Buku	2 Unit	2019
27	Laptop	4 Unit	2019
28	Personal Computer (PC)	4 Unit	2019
29	Printer	4 Unit	2019
30	Sepeda Motor (matic)	1 Unit	2020
31	Laptop	5 Unit	2023
32	PC	3 Unit	2023
33	Printer	5 Unit	2023
34	Laptop	1 Unit	2024

### 2.3 Kinerja Pelayanan

Kecamatan Siantan terus berupaya meningkatkan kinerja



pelayanan kepada masyarakat sebagai bagian dari komitmen terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pelayanan administratif seperti pengurusan surat rekomendasi, dan layanan informasi publik dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, Kecamatan Siantan juga mengembangkan pendekatan yang berbasis teknologi informasi, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan dengan lebih cepat dan efisien.

Selain itu, Kecamatan Siantan aktif dalam membina dan mendampingi desa-desa di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan dukungan SDM yang kompeten dan sinergi antara perangkat kecamatan, pemerintah desa, serta masyarakat, Kecamatan Siantan menunjukkan kinerja yang semakin baik dalam mendukung terciptanya pelayanan yang berkualitas dan inklusif.

Berikut disampaikan hasil capaian kinerja pelayanan pada periode 2021-2026, yaitu;

**Tabel 2.5 (Tabel T-C. 23)**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Siantan**  
**Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian Tahun Ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	-	CC (51,56)	B (60,10)	B (63,15)	B (67)	B (69)	BB (71)	-	-	-	-			-	-	-	-		
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	B (81,29)	B (82)	B (83)	A (86)	A (86,5)	A (87)	90	90	93,16	78,8			111%	110%	112%	92%		
3	Persentase Desa Berkembang menuju Desa Mandiri	-	-	-	-	-	20%	40%	60%	100%	-	-	20%	40%			-	-	100%	100%		
4	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%		



Kinerja Kecamatan Siantan terus menunjukkan perkembangan positif dalam berbagai aspek pelayanan publik dan pembangunan wilayah. Berdasarkan data indikator kinerja, Indeks Reformasi Birokrasi meningkat secara konsisten dari kategori CC (51,56) pada tahun 2021 menjadi B (69) pada tahun 2025, dengan proyeksi mencapai BB (71) pada tahun 2026. Hal ini mencerminkan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan transparan. Sementara itu, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) juga mengalami peningkatan, dari tahun 2021 target B (81,29) dengan realisasi A (90), tahun 2022 B (82) dengan realisasi A (90), tahun 2023 B (83) dengan realisasi A (93,1), dan pada tahun 2024 terjadi penurunan realisasi disebabkan kurangnya responden pada saat penilaian berlangsung dari target A (86) dengan realisasi B (78,8) dan akan menjadi motivasi Kecamatan Siantan dalam memberikan pelayanan yang memenuhi harapan masyarakat untuk kedepannya.

Dalam mendukung pembangunan desa, Kecamatan Siantan telah menargetkan peningkatan persentase desa berkembang menuju desa mandiri, yang dimulai pada tahun 2023 target 20% dengan realisasi 20%, tahun 2024 target 40% dengan realisasi 40% dan direncanakan target mencapai 100% pada tahun 2026. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan tetap menjadi prioritas utama, dengan target partisipasi mencapai 100% setiap tahun hingga tahun 2026. Data ini menggambarkan komitmen Kecamatan Siantan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat dan kolaborasi yang kuat dalam setiap program pembangunan, sehingga mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kemajuan wilayah secara menyeluruh.

Selanjutnya disajikan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Siantan, yaitu:

**Tabel 2.6 (Tabel T-C. 24)**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan  
KECAMATAN SIANTAN Kab. Kepulauan Anambas**

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.618.341.608	4.607.367.793	3.433.471.278	5.120.241.347	5.378.571.779		4.420.386.062	3.664.018.914	4.231.451.066	2.868.470.066			273%	80%	123%	56%			20.157.993.805	15.184.326.108
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	474.640.550	1.072.146.000	1.279.360.600	1.407.296.660	1.548.026.326		1.750.420.480	1.410.679.184	2.022.751.200	1.155.610.500			369%	132%	158%	82%			5.781.470.136	6.339.461.364
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	12.662.588	28.603.000	28.603.000	28.603.000	28.603.000		28.229.500	28.534.200	34.483.700	24.000.000			223%	100%	121%	84%			127.074.588	115.247.400
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	24.747.451	55.901.000	61.491.100	67.640.210	74.404.231		24.487.600	42.925.175	53.934.100	28.163.000			99%	77%	88%	42%			284.183.992	149.509.875



## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

### 1. Tantangan

Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat dan diidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi berkaitan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Siantan serta dalam melaksanakan program dan kegiatan yang meliputi kondisi internal dan kondisi eksternal.

#### a. Kondisi Internal

Tantangan yang berasal dari kondisi internal adalah :

##### 1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pelayanan di Kecamatan Siantan menghadapi tantangan dari sisi kualitas dan kuantitas SDM. Beberapa perangkat kecamatan belum memiliki kompetensi yang optimal sesuai dengan tuntutan tugas, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi dan tata kelola pemerintahan berbasis digital. Selain itu, keterbatasan jumlah pegawai di beberapa bidang menimbulkan beban kerja yang tinggi bagi staf yang ada.

##### 2. Keterbatasan Infrastruktur

Ketersediaan fasilitas pendukung pelayanan seperti kantor, perangkat IT, dan sarana komunikasi masih belum memadai. Hal ini menyebabkan pelayanan kepada masyarakat, terutama di wilayah terpencil, belum dapat dilakukan secara maksimal dan efisien.

##### 3. Pengelolaan Anggaran yang Terbatas

Anggaran operasional kecamatan yang terbatas menjadi kendala dalam mendukung pelaksanaan program strategis, termasuk pengadaan sarana dan prasarana serta kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.



4. Kurangnya Integrasi Sistem Informasi

Belum optimalnya penerapan teknologi informasi dalam pelayanan, seperti sistem administrasi terpadu, membuat proses pelayanan membutuhkan waktu lebih lama dan kurang efisien.

b. Kondisi Eksternal

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Siantan juga menghadapi beberapa tantangan yang berasal dari kondisi eksternal, yaitu :

1. Karakteristik Wilayah Kepulauan

Sebagai wilayah kepulauan, Kecamatan Siantan menghadapi tantangan geografis yang cukup besar, termasuk aksesibilitas antar wilayah yang sulit dan ketergantungan pada moda transportasi laut. Hal ini memengaruhi distribusi pelayanan dan ketersediaan sumber daya di wilayah terpencil.

2. Tingkat Kesadaran Masyarakat

Masih ada masyarakat yang kurang memahami pentingnya peran aktif dalam pembangunan serta prosedur administratif, sehingga partisipasi mereka dalam berbagai program kecamatan masih perlu ditingkatkan.

3. Dampak Perubahan Iklim

Kecamatan Siantan yang memiliki karakteristik pesisir menghadapi risiko kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim, seperti kenaikan muka air laut dan abrasi. Hal ini dapat memengaruhi keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

4. Persaingan dengan Wilayah Lain

Dalam konteks pengembangan pelayanan dan pembangunan, Kecamatan Siantan perlu bersaing



dengan kecamatan lain di Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mendapatkan alokasi sumber daya dan perhatian dari pemerintah daerah.

## **2. Peluang**

Adapun peluang yang mendukung yang berkaitan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan program dan kegiatan Kecamatan Siantan dalam lima tahun ke depan adalah :

### **1. Potensi Pariwisata dan Sumber Daya Alam**

Kecamatan Siantan memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata bahari, perikanan, dan sumber daya alam lainnya. Pengelolaan yang baik terhadap potensi ini dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah serta pengembangan infrastruktur dan pelayanan publik.

### **2. Kemajuan Teknologi Informasi**

Perkembangan teknologi informasi menjadi peluang besar bagi Kecamatan Siantan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan. Implementasi layanan berbasis digital, seperti e-government dan aplikasi pelayanan masyarakat, dapat mempercepat proses administrasi dan memperluas jangkauan pelayanan.

### **3. Dukungan Partisipasi Masyarakat**

Kesadaran masyarakat yang semakin meningkat terhadap pentingnya keterlibatan dalam pembangunan merupakan peluang untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah kecamatan dan masyarakat. Hal ini dapat mendukung keberhasilan program pembangunan yang berbasis kebutuhan lokal.



## **2.5 Permasalahan dan Isu-isu Strategis**

Sebagai salah satu wilayah administratif di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kecamatan Siantan memiliki peran penting dalam menyelenggarakan pelayanan publik, membina pemerintahan desa, dan mendukung pelaksanaan pembangunan di tingkat lokal. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Siantan dihadapkan pada berbagai tantangan yang berkaitan dengan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi masyarakat. Permasalahan yang ada seringkali menjadi hambatan dalam mencapai kinerja pelayanan yang optimal dan keberhasilan program pembangunan. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi secara mendalam untuk memahami permasalahan yang muncul dan isu strategis yang perlu ditangani.

Isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Siantan tidak hanya mencakup aspek internal seperti keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur, tetapi juga aspek eksternal seperti dampak perubahan iklim, tingkat partisipasi masyarakat, serta persaingan antar daerah dalam menarik perhatian pemerintah pusat dan daerah. Dengan memahami permasalahan dan isu strategis ini, Kecamatan Siantan dapat merumuskan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi kendala sekaligus memanfaatkan peluang yang ada guna mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

## **2.6 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung keberhasilan pembangunan di wilayahnya, Kecamatan Siantan perlu memahami secara mendalam berbagai permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Identifikasi permasalahan menjadi langkah penting



untuk mengungkap kendala-kendala yang muncul baik dari aspek internal maupun eksternal. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk menemukan solusi yang tepat, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap program dan kebijakan yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi wilayah. Dengan pendekatan yang berbasis data dan analisis yang komprehensif, Kecamatan Siantan dapat menyusun langkah strategis yang efektif untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam meningkatkan pelayanan dan pembangunan. Berikut disampaikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Siantan, sebagai berikut:

1. Permasalahan dalam Pelayanan Administrasi Publik

- Minimnya Pemanfaatan Teknologi Informasi

Sistem pelayanan berbasis digital belum sepenuhnya diterapkan, sehingga proses pelayanan masih bergantung pada metode manual yang memakan waktu dan kurang efisien.

- Ketidacukupan Fasilitas Pelayanan

Beberapa fasilitas pendukung seperti kantor pelayanan, perangkat komputer, dan jaringan internet belum memadai untuk mendukung operasional yang optimal.

2. Permasalahan dalam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Kurangnya Kapasitas Aparatur Desa

Sebagian aparatur desa belum memiliki pemahaman dan keterampilan yang cukup dalam mengelola pemerintahan desa, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan administrasi.

- Koordinasi yang Belum Optimal



Sinergi antara pemerintah kecamatan dan desa belum berjalan maksimal, terutama dalam pelaksanaan program pembangunan yang membutuhkan kolaborasi intensif.

3. Permasalahan dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat:

- Tingkat Partisipasi Masyarakat yang Belum Merata

Tidak semua masyarakat memiliki kesadaran untuk terlibat aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di wilayahnya.

- Ketergantungan pada Bantuan Pemerintah

Banyak program pemberdayaan yang bergantung pada anggaran dari pemerintah daerah atau pusat, sehingga keberlanjutan program sering kali terganggu jika dukungan anggaran terbatas.

4. Permasalahan dalam Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Tantangan Penegakan Peraturan di Wilayah Terpencil

Jarak antar wilayah yang jauh menyulitkan pengawasan dan penegakan peraturan secara konsisten.

- Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat

Masih ada masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya menjaga ketertiban umum dan mematuhi peraturan yang berlaku.

Berikut adalah tabel pemetaan permasalahan yang memuat masalah pokok, masalah yang dihadapi, dan akar permasalahannya:



**Tabel. 2.7 (Tabel. T-B.35.)**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran**  
**Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah yang Dihadapi	Akar Masalah
1	Pelayanan Administrasi Publik	- Minimnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan.	- Sistem pelayanan belum sepenuhnya berbasis digital.
		- Ketidakcukupan fasilitas pendukung pelayanan.	- Keterbatasan anggaran untuk pengadaan fasilitas.
2	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	- Kurangnya kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan.	- Minimnya pelatihan dan pendampingan teknis bagi aparatur desa.
		- Koordinasi yang belum optimal antara kecamatan dan pemerintah desa.	- Kurangnya mekanisme komunikasi yang terstruktur dan efektif.
3	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	- Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang belum merata.	- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peran aktif dalam pembangunan.
		- Ketergantungan pada bantuan pemerintah dalam program pemberdayaan.	- Kurangnya diversifikasi sumber pendanaan atau kemandirian masyarakat dalam menjalankan program.
4	Ketentraman dan Ketertiban Umum	- Tantangan penegakan peraturan di wilayah terpencil.	- Jarak antarwilayah yang jauh menyulitkan pengawasan rutin.
		- Rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat.	- Minimnya edukasi tentang hukum dan peraturan kepada masyarakat.

Pemetaan ini menjadi langkah awal dalam menetapkan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang selaras



dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung stabilitas sosial-politik di Kabupaten Kepulauan Anambas.

## **2.7 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas terpilih telah menetapkan visi dan misi periode lima kedepan 2025-2029 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi periode 2025-2029 yaitu :

“Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera”

Untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dituangkan ke dalam empat (5) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Agamis, dan Berbudaya dengan Mengedepankan Nilai-nilai Luhur.
2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan.
3. Mewujudkan Pelayanan yang Prima Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi yang Inovatif.
4. Memperkuat Pengembangan Ekonomi Berbasis Maritim dan Pariwisata.
5. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan.

Dari penjabaran visi dan misi serta program kerja unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Siantan terdapat pada Misi Ke-3 (ketiga) yaitu “Mewujudkan Pelayanan yang Prima Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi yang Inovatif”.



## 2.8 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Dalam merumuskan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja Kecamatan Siantan yang akan dituangkan dalam Dokumen Renstra diharapkan dapat berkaitan dengan visi dan misi Kementerian/Lembaga maupun instansi terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas agar pelaksanaan program dan kegiatan akan searah pada koridor yang benar. Untuk itu sangat perlu memperhatikan arah kebijakan Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, dengan dipandu Visi : *Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.* Dengan uraian misi sebagai berikut:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pematapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.



Dari penjabaran visi dan misi Kementerian Dalam Negeri yang berkaitan Kecamatan Siantan melalui Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan umum, sasaran dan tujuan strategis yang dirumuskan sebagai berikut :

a. Tujuan Strategis

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

b. Sasaran Strategis

1. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
  - (a) Indeks Demokrasi Indonesia.
  - (b) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu
  - (c) Indeks Kinerja Ormas.
2. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :
  - (a) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
  - (b) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
  - (c) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
  - (d) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
3. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai



tolak ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :

- (a) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
- (b) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
- (c) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
- (d) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.

4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :

- (a) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”.
- (b) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

## **2.9 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Telaahan Renstra K/L dan Renstra**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023-2043, pada pasal 6, Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Ruang Wilayah kepulauan perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan Berbasis Agromarinawisata, Minyak dan Gas serta Industri Ramah Lingkungan Berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Permasalahan pokok dalam penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas ke depan meliputi:

- a. batasan kondisi fisik dasar Wilayah (letak geografis, hidrologi, klimatologi, geologi dan oceanografi) yang mempengaruhi daya dukung lahan pulau-pulau kecil



- untuk pengembangan kegiatan;
- b. keterbatasan luas lahan Kawasan Budi Daya, yaitu 93% dari total luas Kepulauan Anambas merupakan Wilayah kelautan dan pulau-pulau kecil;
  - c. Kabupaten Kepulauan Anambas berada pada jalur ALKI II di Laut Cina Selatan sehingga mempunyai potensi ekspor hasil-hasil olahan laut yang besar; dan
  - d. potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung Penataan Ruang Wilayah 20 tahun mendatang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menjadi pedoman utama dalam penataan ruang. RTRW bertujuan untuk mewujudkan wilayah kepulauan yang maju, mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan berbasis agromarinawisata, minyak dan gas, serta industri ramah lingkungan. Sebagai acuan, RTRW berfungsi untuk menyusun RDTR, perencanaan pembangunan jangka panjang, dan jangka menengah, serta menjadi dasar dalam pengelolaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan tata ruang.

Pengembangan tata ruang Kabupaten Kepulauan Anambas difokuskan pada sistem pusat permukiman yang terintegrasi dengan hierarki Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), serta Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). Pengembangan sistem infrastruktur wilayah dilakukan secara terintegrasi, meliputi jaringan transportasi laut, darat dan udara, energi, telekomunikasi, sumber daya air, serta fasilitas pendukung lainnya, guna meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata.

Pelestarian lingkungan menjadi prioritas utama dalam pembangunan, dengan fokus pada perlindungan kawasan



lindung seperti hutan, daerah resapan air, dan ruang terbuka hijau. Upaya ini diwujudkan melalui pengendalian pemanfaatan ruang agar tidak melampaui daya dukung lingkungan serta pengembangan infrastruktur mitigasi bencana. Sebagai bagian dari strategi keberlanjutan, pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab, termasuk melalui optimalisasi kawasan pesisir dan pulau kecil berbasis ekosistem, pengembangan energi terbarukan, dan penguatan kapasitas masyarakat lokal.

Dalam mendukung keberlanjutan pembangunan, pengembangan sektor ekonomi berbasis masyarakat menjadi salah satu fokus utama. Sektor kelautan, agribisnis, pariwisata, dan industri kecil menengah dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan daya saing lokal. Selain itu, kawasan strategis, baik dari sudut pandang ekonomi, sosial, maupun lingkungan, akan dikembangkan secara optimal, dengan tetap mempertahankan keseimbangan fungsi pertahanan, keamanan, dan kegiatan ekonomi di wilayah perbatasan.

Rencana pembangunan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip sinergi antara kebijakan pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Peran aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan ruang sangat penting untuk menjamin keberhasilan program pembangunan. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan, Kabupaten Kepulauan Anambas diharapkan mampu menjadi wilayah yang berdaya saing tinggi, sejahtera, dan berkelanjutan sesuai dengan RTRW tahun 2023–2043.

## **2.10 Penentuan Isu-isu Strategis**

Sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kecamatan Siantan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah melalui pelayanan publik



yang berkualitas, pembinaan pemerintahan desa, serta pemberdayaan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, terdapat berbagai tantangan yang memerlukan perhatian khusus. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang dapat menjadi fokus perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di Kecamatan Siantan.

Isu strategis merupakan permasalahan mendasar yang memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Isu-isu strategis ini diidentifikasi berdasarkan analisis terhadap kondisi geografis, sosial, ekonomi, serta tantangan dan peluang yang ada. Berikut adalah isu-isu strategis Kecamatan Siantan:

#### 1. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik

Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik, melalui pengembangan infrastruktur pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi.

#### 2. Penguatan Kapasitas dan Koordinasi Pemerintahan Desa

Meningkatkan kompetensi aparatur desa serta memperkuat sinergi antara pemerintah kecamatan dan desa untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

#### 3. Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di wilayah kecamatan.

#### 4. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik



yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Pemerintah Daerah. .

#### 5. Peningkatan Ketertiban dan Kesadaran Hukum Masyarakat

Memperkuat penegakan hukum dan ketertiban umum melalui edukasi masyarakat serta pengawasan yang lebih efektif, khususnya di wilayah-wilayah terpencil.

#### 6. Mitigasi Risiko Perubahan Iklim

Mengantisipasi dampak perubahan iklim, seperti kenaikan muka air laut dan abrasi, dengan menyusun kebijakan adaptasi dan mitigasi yang melibatkan masyarakat lokal.

Isu-isu strategis ini diharapkan dapat menjadi pijakan dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah Kecamatan Siantan. Dengan pendekatan yang terarah dan berbasis isu strategis, diharapkan program-program yang dirancang dapat memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.



## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 3.1 Tujuan dan Sasaran

Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan pelayanan publik yang berkualitas, Kecamatan Siantan menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah yang dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat serta menghadapi tantangan yang ada. Tujuan-tujuan ini disusun berdasarkan analisis kondisi eksisting, potensi wilayah, dan visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas. Melalui pendekatan yang terukur dan strategis, tujuan dan sasaran ini menjadi panduan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja di tingkat kecamatan.

Penetapan sasaran yang terukur dilakukan untuk memastikan bahwa setiap program dan kebijakan yang dilaksanakan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Sasaran ini diukur dengan indikator kinerja yang relevan, mencakup berbagai aspek seperti kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, hingga pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran dapat dipantau secara sistematis, sekaligus menjadi dasar untuk mengevaluasi pencapaian yang telah diraih.

Melalui tabel berikut, disajikan rincian tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan target yang akan dicapai setiap tahun selama periode 2025-2029. Rincian ini menjadi komitmen Kecamatan Siantan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan yang lebih baik, tata kelola pemerintahan yang efektif, dan pembangunan yang inklusif. Implementasi tujuan dan sasaran ini diharapkan dapat mendorong keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan di wilayah Kecamatan Siantan.

**Tabel. 3.1. (Tabel T-C.25.)  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Siantan**

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Mewujudkan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel		Predikat AKIP	B	B	B	B	B	B
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Nilai AKIP	(63,66)	(65,34)	(67,05)	(68,72)	(70,46)	(71,86)
			Meningkatnya Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Wilayah Kecamatan	70%	75%	80%	85%	90%	90%



### 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka mendukung pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, Kecamatan Siantan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang menjadi landasan pelaksanaan program kerja selama periode 2025-2029. Tujuan dan sasaran dirancang untuk mencapai hasil yang konkret dan terukur, sementara strategi dan kebijakan menjadi panduan dalam pelaksanaan program serta alokasi sumber daya. Pendekatan ini bertujuan memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian hasil pembangunan yang sesuai dengan prioritas wilayah.

Strategi difokuskan pada upaya menyelesaikan permasalahan mendasar, memanfaatkan potensi, dan menangkap peluang pembangunan. Sementara itu, arah kebijakan ditetapkan untuk memberikan panduan teknis yang lebih spesifik dalam pelaksanaan strategi. Dengan sinergi antara tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan, Kecamatan Siantan berkomitmen untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat pelayanan publik serta pengelolaan sumber daya secara optimal. Berikut adalah tabel yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah disusun untuk jangka waktu 2025 hingga 2029:

**Tabel. 3.2 (Table T-C.26)**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Visi :	Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat yang Maju dan Sejahtera			
Misi :	3. Mewujudkan Pelayanan yang Prima Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi yang Inovatif			
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	- Mengembangkan infrastruktur pelayanan publik.	- Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan di wilayah perbatasan.
			- Memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan.	- Digitalisasi sistem pelayanan administrasi.



Visi :	Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat yang Maju dan Sejahtera			
Misi :	3. Mewujudkan Pelayanan yang Prima Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi yang Inovatif			
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			- Mengadakan pelatihan dan pendampingan teknis bagi aparatur desa.	- Peningkatan alokasi anggaran untuk pengembangan SDM aparatur desa.
			- Membentuk mekanisme komunikasi dan rapat koordinasi berkala.	- Penyusunan jadwal rutin dan pedoman pelaksanaan koordinasi.
		Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	- Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi.	- Penyusunan program edukasi pembangunan berbasis masyarakat.
			- Memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat berbasis ekonomi lokal.	- Penambahan dukungan teknis dan finansial untuk program pemberdayaan.

Tabel ini menggambarkan langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas dalam upaya mencapai tujuan jangka menengah. Dengan arahan kebijakan yang jelas, diharapkan seluruh program yang dijalankan akan menghasilkan dampak positif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas.



## BAB IV

### RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN SERTA KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

#### 4.1 Latar Belakang

Dalam rangka mencapai tujuan strategis dan sasaran pembangunan Kecamatan Siantan periode 2025-2029, telah disusun rencana program dan kegiatan yang mendukung optimalisasi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan tata kelola pemerintahan. Program-program ini dirancang untuk menjawab berbagai tantangan serta memanfaatkan peluang yang ada, dengan fokus pada efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan. Selain itu, setiap program didukung oleh alokasi pendanaan yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan optimal.

Pendanaan untuk pelaksanaan program-program ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan dukungan tambahan dari potensi sumber pendanaan lainnya. Pendekatan kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan juga akan menjadi salah satu strategi dalam mengimplementasikan program.

Berikut adalah daftar program-program yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas selama lima tahun mendatang:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Mendukung administrasi umum pemerintahan, seperti pengelolaan aset dan keuangan kecamatan.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi pelayanan dan peningkatan kapasitas aparatur.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan



Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pelatihan dan pendampingan.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Menguatkan koordinasi dengan aparat keamanan dan masyarakat dalam menjaga ketentraman wilayah.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Memastikan keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan melalui pembenahan tata kelola administrasi.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Menguatkan tata kelola desa melalui pelatihan aparatur dan supervisi rutin.

Rencana program dan kegiatan ini akan dilaksanakan secara terstruktur dengan alokasi pendanaan yang optimal. Pendanaan indikatif disajikan secara lengkap pada tabel berikut.

Tabel 4.3 (Tabel T-C. 27.)  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SIANTAN  
 KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	BASELINE 2024	2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi
								Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai AKIP	Predikat AKIP															
			7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	90%	90%	100%	4.981.588.672	100%	5.031.404.559	100%	5.081.718.604	100%	5.132.535.790	100%	5.183.861.148	Kecamatan Siantan
					Indeks Kepuasan Masyarakat	84,2%	85%	86%		87%		88%		89%		91%		
			7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90%	90%	100%	18.595.460	100%	18.781.415	100%	18.969.229	100%	19.158.921	100%	19.350.510	Kecamatan Siantan
			7.01.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	14.150.000	2 Dokumen	14.301.500	2 Dokumen	14.454.515	2 Dokumen	14.609.060	Kecamatan Siantan
			7.01.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	3.595.460	1 Laporan	3.631.415	1 Laporan	3.667.729	1 Laporan	3.704.406	1 Laporan	3.741.450	Kecamatan Siantan
			7.01.01.2.01.008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah					1 Dokumen	500.000	1 Dokumen	500.000	1 Dokumen	500.000	1 Dokumen	500.000	Kecamatan Siantan
			7.01.01.2.01.009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah					Data	500.000	Data	500.000	Data	500.000	Data	500.000	Kecamatan Siantan
			7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90%	90%	100%	4.527.467.011	100%	4.572.941.681	100%	4.618.871.098	100%	4.665.259.809	100%	4.712.112.407	Kecamatan Siantan
			7.01.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	4.361.399.177	14 Orang/bulan	4.405.213.169	14 Orang/bulan	4.449.465.300	14 Orang/bulan	4.494.159.953	14 Orang/bulan	4.539.301.553	Kecamatan Siantan
			7.01.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	164.497.703	12 Dokumen	166.142.680	12 Dokumen	167.804.107	12 Dokumen	169.482.148	12 Dokumen	171.176.969	Kecamatan Siantan
			7.01.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	1.570.131	1 Laporan	1.585.832	1 Laporan	1.601.691	1 Laporan	1.617.708	1 Laporan	1.633.885	Kecamatan Siantan
			7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	90%	90%	100%	3.140.262	100%	3.171.665	100%	3.203.381	100%	3.235.415	100%	3.267.769	Kecamatan Siantan
			7.01.01.2.03.005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	8 Laporan	2 Laporan	1.570.131	2 Laporan	1.585.832	2 Laporan	1.601.691	2 Laporan	1.617.708	2 Laporan	1.633.885	Kecamatan Siantan
			7.01.01.2.03.006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	8 Laporan	2 Laporan	1.570.131	2 Laporan	1.585.832	2 Laporan	1.601.691	2 Laporan	1.617.708	2 Laporan	1.633.885	Kecamatan Siantan
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90%	90%	100%	4.093.100	100%	4.134.031	100%	45.081.381	100%	4.217.125	100%	4.259.296	Kecamatan Siantan			
7.01.01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket		-		-	1 Paket	25.906.010		-		-	Kecamatan Siantan			
7.01.01.2.05.003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.093.100	1 Dokumen	4.134.031	1 Dokumen	4.175.371	1 Dokumen	4.217.125	1 Dokumen	4.259.296	Kecamatan Siantan			

Meningkatnya Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	7.01.01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2 Orang	1 Orang	-	-	1 Orang	15.000.000	-	-	-	Kecamatan Siantan		
		7.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>100%</b>	<b>199.768.305</b>	<b>100%</b>	<b>191.665.988</b>	<b>100%</b>	<b>193.582.648</b>	<b>100%</b>	<b>206.733.545</b>	<b>100%</b>	<b>208.800.880</b>	Kecamatan Siantan
		7.01.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	1 Paket	8.419.873	1 Paket	8.504.072	1 Paket	8.589.112	1 Paket	8.675.004	1 Paket	8.761.754	Kecamatan Siantan
		7.01.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	10.000.000	-	-	-	1 Paket	11.215.070	1 Paket	11.327.221	Kecamatan Siantan	
		7.01.01.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	1 Paket	30.396.857	1 Paket	30.700.826	1 Paket	31.007.834	1 Paket	31.317.912	1 Paket	31.631.091	Kecamatan Siantan
		7.01.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	1 Paket	35.139.575	1 Paket	35.490.971	1 Paket	35.845.880	1 Paket	36.204.339	1 Paket	36.566.383	Kecamatan Siantan
		7.01.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	1 Paket	18.000.000	1 Paket	18.180.000	1 Paket	18.361.800	1 Paket	18.545.418	1 Paket	18.730.872	Kecamatan Siantan
		7.01.01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	42.220.000	1 Laporan	42.642.200	1 Laporan	43.068.622	1 Laporan	43.499.308	1 Laporan	43.934.301	Kecamatan Siantan
		7.01.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	55.592.000	5 Laporan	56.147.920	5 Laporan	56.709.399	5 Laporan	57.276.493	5 Laporan	57.849.258	Kecamatan Siantan
		7.01.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>100%</b>	<b>30.100.000</b>	<b>100%</b>	<b>40.501.000</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	Kecamatan Siantan
		7.01.01.2.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	-	-	1 Unit	40.501.000	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Siantan
		7.01.01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	30.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Siantan
		7.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>100%</b>	<b>164.644.534</b>	<b>100%</b>	<b>166.090.979</b>	<b>100%</b>	<b>167.551.889</b>	<b>100%</b>	<b>169.027.408</b>	<b>100%</b>	<b>170.517.682</b>	Kecamatan Siantan
		7.01.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	80.916.278	1 Laporan	81.725.441	1 Laporan	82.542.695	1 Laporan	83.368.122	1 Laporan	84.201.803	Kecamatan Siantan
		7.01.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	63.728.256	1 Laporan	64.365.539	1 Laporan	65.009.194	1 Laporan	65.659.286	1 Laporan	66.315.879	Kecamatan Siantan
		7.01.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	20.000.000	Kecamatan Siantan
		7.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>100%</b>	<b>33.780.000</b>	<b>100%</b>	<b>34.117.800</b>	<b>100%</b>	<b>34.458.978</b>	<b>100%</b>	<b>64.903.568</b>	<b>100%</b>	<b>65.552.603</b>	Kecamatan Siantan
		7.01.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	4 Unit	13.560.000	4 Unit	13.695.600	4 Unit	13.832.556	4 Unit	13.970.882	4 Unit	14.110.590	Kecamatan Siantan
7.01.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	10 Unit	20.220.000	10 Unit	20.422.200	10 Unit	20.626.422	10 Unit	20.832.686	10 Unit	21.041.013	Kecamatan Siantan		
7.01.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	-	-	-	-	-	-	2 Unit	30.100.000	2 Unit	30.401.000	Kecamatan Siantan		

		7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	88%	89%	91%	15.000.000	92%	16.050.000	93%	17.173.500	94%	18.118.043	95%	19.114.535	Kecamatan Siantan	
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	88%	89%	91%	15.000.000	92%	16.050.000	93%	17.173.500	94%	18.118.043	95%	19.114.535	Kecamatan Siantan	
		7.01.02.2.02.003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	16.050.000	1 Laporan	17.173.500	1 Laporan	18.118.043	1 Laporan	19.114.535	Kecamatan Siantan	
	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Wilayah Kecamatan	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Fasilitas Penataan Desa	84%	85%	88%	759.309.441	91%	813.051.988	93%	867.248.943	95%	923.174.473	98%	977.943.984	Kecamatan Siantan	
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	84%	85%	88%	245.500.000	91%	262.685.000	93%	281.072.950	95%	296.531.962	98%	296.531.962	Kecamatan Siantan	
		7.01.03.2.01.003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	245.500.000	2 Laporan	262.685.000	2 Laporan	281.072.950	2 Laporan	296.531.962	2 Laporan	296.531.962	Kecamatan Siantan	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	84%	85%	88%	513.809.441	91%	550.366.988	93%	586.175.993	95%	621.642.511	98%	676.412.022	Kecamatan Siantan	
		7.01.03.2.02.001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	6.420.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	6.869.400	2 Lembaga Kemasyarakatan	7.247.217	2 Lembaga Kemasyarakatan	7.645.814	Kecamatan Siantan	
		7.01.03.2.02.002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit		-		-		-		-	1 Unit	34.000.000	Kecamatan Siantan	
		7.01.03.2.02.003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	507.809.441	2 Pokmas / Ormas	543.946.988	2 Pokmas / Ormas	579.306.593	2 Pokmas / Ormas	614.395.294	2 Pokmas / Ormas	634.766.208	Kecamatan Siantan	
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	84%	85%	88%	-	91%	-	93%	-	95%	5.000.000	98%	5.000.000	Kecamatan Siantan	
		7.01.03.2.03.003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit		-		-		1 Unit	5.000.000	1 Unit	5.000.000	Kecamatan Siantan		
		7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum				-	84%	2.000.000	87%	2.140.000	90%	2.257.700	93%	2.381.874	Kecamatan Siantan	
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				-	84%	2.000.000	87%	2.140.000	90%	2.257.700	93%	2.381.874	Kecamatan Siantan	
		7.01.04.2.01.002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.140.000	1 Laporan	2.257.700	1 Laporan	2.381.874	Kecamatan Siantan		

		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	87%	87%	89%	70.614.088	84%	75.557.074	87%	80.846.069	90%	85.292.603	93%	89.983.696	Kecamatan Siantan	
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	87%	100%	89%	70.614.088	84%	75.557.074	87%	80.846.069	90%	85.292.603	93%	89.983.696	Kecamatan Siantan	
		7.01.05.2.01.003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			10 Orang	15.000.000	10 Orang	16.050.000	10 Orang	17.173.500	10 Orang	18.118.043	10 Orang	19.114.535	Kecamatan Siantan	
		7.01.05.2.01.008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	55.614.088	1 Dokumen	59.507.074	1 Dokumen	63.672.569	1 Dokumen	67.174.561	1 Dokumen	70.869.162	Kecamatan Siantan	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	88%	88%	89%	99.576.472	93%	106.546.825	95%	114.005.102	97%	120.275.383	99%	126.890.529	Kecamatan Siantan	
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	88%	88%	89%	99.576.472	93%	106.546.825	95%	114.005.102	97%	120.275.383	99%	126.890.529	Kecamatan Siantan	
		7.01.06.2.01.011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	37.045.690	1 Dokumen	39.638.888	1 Dokumen	42.413.610	1 Dokumen	44.746.359	1 Dokumen	47.207.409	Kecamatan Siantan	
		7.01.06.2.01.013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	11.824.881	1 Dokumen	12.652.623	1 Dokumen	13.538.306	1 Dokumen	14.282.913	1 Dokumen	15.068.474	Kecamatan Siantan	
		7.01.06.2.01.017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	50.705.900	5 Laporan	54.255.313	5 Laporan	58.053.185	5 Laporan	61.246.110	5 Laporan	64.614.647	Kecamatan Siantan	
<b>Jumlah Pendanaan</b>								<b>5.926.088.672</b>	<b>6.044.610.445</b>	<b>6.163.132.219</b>	<b>6.281.653.992</b>	<b>6.400.175.766</b>						



## 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kecamatan Siantan terus berupaya meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, berbagai program dan kegiatan telah dijalankan untuk mendukung fungsi utama kecamatan, seperti koordinasi pemerintahan desa, pembinaan masyarakat, dan penyediaan layanan administrasi. Melalui optimalisasi sumber daya dan penerapan teknologi informasi, penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Siantan menunjukkan perbaikan yang signifikan, baik dalam hal efisiensi waktu maupun peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

Selain itu, koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, aparat keamanan, dan organisasi masyarakat, telah menghasilkan capaian positif dalam menjaga ketertiban umum serta memperkuat sinergi pembangunan. Pendekatan partisipatif juga diterapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan wilayah. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen Kecamatan Siantan untuk terus meningkatkan kinerja di seluruh bidang urusan, guna mewujudkan pelayanan yang lebih baik dan pembangunan yang inklusif.



**Tabel. 4.5 (Tabel T-C.28)**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Kecamatan Siantan**

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada awal periode RPJMD	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Predikat AKIP	B	B	B	B	B	B	B	
2	Nilai AKIP	60,10	63,66	65,34	67,05	68,72	70,46	71,86	
3	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Wilayah Kecamatan	70%	70%	75%	80%	85%	90%	90%	

Tabel ini mencerminkan komitmen Kecamatan Siantan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsi. Fokus pada indikator-indikator strategis diharapkan mampu menciptakan kinerja yang optimal sekaligus mendukung pencapaian visi pembangunan daerah.

**Tabel. 4.6**  
**Indikator Kinerja Kunci**

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Nilai SAKIP	Predikat	B	B	B	B	B	B	
2	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Mensukseskan Pembangunan di Wilayah Kecamatan	Baik	76,69	65,34	67,05	68,72	70,46	71,86	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	85	85	87	88	89	91	



## BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Siantan periode 2025-2029 disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Dokumen ini mencerminkan komitmen Kecamatan Siantan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan mendorong pemberdayaan masyarakat. Dengan mengintegrasikan berbagai potensi yang dimiliki serta mengantisipasi tantangan yang ada, Renstra ini diharapkan menjadi landasan yang kokoh bagi tercapainya tujuan pembangunan sesuai visi dan misi Kabupaten Kepulauan Anambas.

Melalui kolaborasi yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingan, pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dirumuskan akan terus dimonitor dan dievaluasi untuk memastikan efektivitasnya. Sinergi antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat merupakan kunci utama dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan Renstra ini. Dengan semangat kerja sama dan komitmen yang tinggi, Kecamatan Siantan optimis dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah kecamatan.

Tarempa, 4 September 2025

CAMAT SIANTAN,

  
KAHARUZZAMAN, S.Sos

Pembina Tk. I/ IV.b

NIP. 19701116 199101 1 001